

RILIS NASIONAL

Sebanyak 1.807 WBP Kemenkumham NTB Diusulkan Mendapat Remisi

Syafruddin Adi - NTB.RILISNASIONAL.COM

Apr 30, 2022 - 23:05



kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asazi Manusia (Kumham) NTB Romi Yudianto,

Mataram NTB - Sebanyak 1.807 Orang Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Kementerian Hukum dan Ham NTB diusulkan mendapat remisi Khusus Hari Raya Idul Fitri 1443 H / 2022 M bagi nara pidana dan anak didik pada Lapas / rutan / LPKA se-nusa tenggara barat sesuai keputusan menteri Hukum Dan Ham RI.

Hal ini disampaikan oleh kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kumham) NTB Romi Yudianto, Senin (29/04) di Kanwil Kumham NTB.

Adapun pemberian remisi tersebut lanjut Romy, sesuai kepmen Kumham RI ada 1.807 nara pidana dan anak didik yang berada di Rutan / Lapas /LPKA di usulkan Kumham NTB untuk di berikan Remisi dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1443 H sesuai kriteria dan hasil evaluasi selama menjadi WBP di lapas / Rutan / LPKA Kemenkum Ham NTB.

Usulan Remisi tersebut terdiri dari 1.266 dari Pidana Umum dan sebanyak 541 orang dari pidana khusus (PP 99 tahun 2012).

Secara rinci Romy menyampaikan, ke 1.266 yang diusulkan memperoleh remisi dari pidana umum tersebut terdiri dari satuan kerja sebagai berikut :

Lapas kelas II A Mataram 353 orsng, Lapas Kelas II A Sumbawa 279 Orang, Lapas Kelas II B Dompu 189 orang, Lapas Kelas II B Selong 136 Orang, Lapas terbuka kelas II B Lombok Tengah 29 Orang, LPKA kelas II Lombok Tengah 43 orang, Lapas Perempuan kelas II Mataram 19 Orang, Rutan kelas II B Praya 90 orang dan Rutan kelas II B Raba Bima 128 Orang.

Sedangkan untuk 541 Pidana khusus terdiri dari Lapas kelas II A Matsram 222 orang, Lapas kelas II A Sumbawa 72 orang, Lapas Kelas II B Dompu 68 orang, Lapas Kelas II B Selong 89 orsng, Lapas Terbuka kelas II B Lombok Tengah 0, LPKA kelas II Lombok Tengah 0, Lapas Perempuan Kelas II Mataram 40 orang, Rutan kelas II B Praya 43 orang dan Rutan kelas II B Raba Bima 7 orang.

Romi menjelaskan usulan yang diajukan untuk pemberian remisi tersebut berdasarkan hasil penilaian terhadap tingkah laku para warga binaan selama berada di dalam pembinaan Pemasarakatan.

"Ini merupakan apresiasi pemerintah terhadap para warga binaan yang memang benar-benar menunjukkan perubahan kearah hidup yang lebih baik serta terlihat dengan sungguh-sungguh untuk tidak lagi mengulangi kesalahannya, "pungkasnya.(Adb)